Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan e-Desa di Kabupaten Bandung (Kualifikasi Pendidikan Teknologi Perangkat Desa)

Development of e-Desa Policy Model In Bandung Regency (Education Qualification Technology Of Perangkat Desa)

ABSTRAK. *Electronic Desa* (*e-Desa*) merupakan sistem yang dapat didasarkan pada teknologi *cloud computing*. Dengan *e-Desa* maka pemerintah desa tidak perlu direpotkan dengan penyediaan infrastruktur sistem seperti server, aplikasi dan perawatan sistem. Harapan dengan adanya sistem *e-Desa* ini adalah pemerintah desa dapat mandiri dalam pengelolaan informasi dan administrasi yang dilakukan. Pembangunan *e-Desa* ini ditujukan khusus untuk mendapatkan model pengelolaan informasi dan administrasi yang dilakukan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bandung dalam semangat otonomi daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi mendasar pada Ilmu Pemerintahan khususnya tentang konsep baru tentang *e-Government*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan yang digunakan *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan serta validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model kebijakan pembangunan *e-Desa* dapat berhasil bilamana ditunjang oleh kualifikasi pendidikan teknologi perangkat desa yang memadai. Kenyatannya, hal ini masih kurang di kalangan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

ABSTRACT. *Electronic Desa (e-Desa) is a system that based on cloud computing technology, then the government shouldn't bothered by infrastructure suplly such as server, aplication, and system tendance. The hope with the introduction of this e- Desa system are village government is able to self-financed in the information management and administrative conducted. The aims of developing e-Desa are specificly for getting a management information model and administrative conducted by village government to increase service in apropriate with vission and mission Bandung Regency in regional autonomy spirit. This research has for giving basic contribution in government science esspecially to new concept about e-Government. This research used description method with qualitative approach then the determination technique of informants using purposive (taking informants based on the aims). Collecting data technique that used in this research is library studies and range studies long data validity in this research using triangulation. Result of the research showed that development of e-Desa policy model can be successful if it's supported by adequate technology educational qualifications of the village government. In fact, there was still lacking in the village government of bandung district government environment.*

Keywords: Policy, e-Desa, e-Government.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini diawali dengan pemahaman bahwa dsa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam operasional kerja pemerintahannya. TIK dianggap memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menyampaikan informasi tanpa batasan tempat, jarak dan waktu. Pemanfaatan TIK dapat membantu desa dalam hal pengolahan administrasi pemerintahannya agar lebih cepat, efektif dan efisien. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung terkait kondisi wilayahnya yang luas dengan geografis yang dikelilingi gunung dan bukit.

Cloud Computing muncul sebagai layanan yang dapat memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan akses secara elektronik terhadap sebuah informasi khususnya terkait pelayanan pada masyarakat. Akses data dari mana saja dapat menggunakan perangkat *fixed* atau *mobile device* menggunakan internet *cloud* sebagai tempat menyimpan data dengan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan kita mengambil data, *download* dan berpindah ke *cloud* lainnya. Hal ini akan memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pemerintah desa sebagai pemberi layanan (*provider*) atau dari sisi masyarakat sebagai pengguna (*user*). Salah satu keuntungan yang dapat dirasakan pemerintah desa adalah tidak perlu memikirkan sumber daya infrastrukur sistem, aplikasi dan media penyimpanan, karena hal ini telah disiapkan oleh penyedia *cloud*.

Electronic Desa (*e-Desa*) merupakan sebuah sistem yang dapat didasarkan pada teknologi *cloud computing*. Dengan *e-Desa* maka pemerintah desa tidak perlu direpotkan dengan penyediaan infrastruktur sistem seperti server, aplikasi dan perawatan sistem. pemerintah desa cukup menyewa sistem *cloud e-Desa*nya saja, mengisi konten didalamnya maupun menggunakan aplikasi administrasi yang telah disediakan didalam *cloud e-Desa*.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut bagaimana pendidikan teknologi perangkat desa mampu mengembangkan model kebijakan *e-Desa* di Kabupaten Bandung?

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kebijakan *e-Desa* di Kabupaten Bandung. Sedangkan manfaat penelitian ini memberikan kemudahan perangkat desa dalam mengelola informasi dan administrasi pemerintah desa, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dalam semangat otonomi desa dapat meningkat.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam tulisan ini adakan dimulai dari tinjauan pustaka yang terkait dengan beberapa konsep dan teori yang digunakan. Anderson yang dikutip Wahab, merumuskan "Kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi." (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijakan. Michael Hill dan Peter Hupe (2002:3-4) berpendapat:

> "*... means just what Webster and Roger say it does: to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete. But what is it being implemented? A policy, naturally. There must be something out there prior to implementation; otherwise there would be nothing to move toward in the process of implementation. A verb like 'implement' must have an object like 'policy'. But policies normally contain both goals and the means for achieving them. How, then, do we distinguish between a policy and its implementation?*"

Pendapat di atas menunjukkan konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pembangunan desa adalah suatu usaha menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu berupa perubahan-perubahan yang direncanakan dengan mendayagunakan segala potensi yang ada, baik potensi alam, manusia, dan sosial budaya. Menurut Soejadi (1989:4):

> "Pembangunan adalah sebagai keseluruhan proses penyelenggaraan kerjasama antar aparatur negara dan pemerintahan dengan dukungan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan, perbaikan, dan perkembangan positif disegala bidang kehidupan masyarakat dalam rangka pembinaan bangsa secara keseluruhan".

Definisi di atas menjelaskan bahwa pembangunan sebagai suatu gejala dalam masyarakat harus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan bekesinambungan.

Pengertian desa menurut Siagian (1989:3) sebagai berikut:

> "Desa adalah suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap disuatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu kepala desa. Kehidupan penduduk desa umumnya tergantung dari usaha tani, nelayan dan sering disertai dengan usaha kerajinan tangan dan dagang kecil-kecilan".

Pembangunan masyarakat desa merupakan salah satu bentuk pembangunan yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan untuk mengubah suatu kondisi masyarakat desa kearah yang lebih baik disegala aspek kehidupan baik itu fisik, material, dan mental spiritual.

Kemampuan pemerintah sebagai organisasi kekuasaan seharusnya dapat menerapkan berbagai model kebijakan, termasuk di dalam penerapan *e-Government* yang menyediakan layanan dalam bentuk elektronik. Douglas Holmes (2001:2) memberikan definisi dari *e-Government* yaitu: "*electronic government, or e-Government, is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer-oriented, cost-effective, and altogether different and better way"*. Definisi tersebut menggambarkan pelayanan yang diberikan pemerintah secara *online* akan memudahkan warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelayanan yang diberikan secara *online* juga bermanfaat untuk mengurangi biaya, proses yang berbelit-belit, menambah kecepatan, serta membuat proses lebih *fleksibel* dan *responsif.*

Gambar 1
Unsur-unsur e-Government



Sumber : http://e-gov.cs.ui.ac.id/wp-content/uploads/2008/09/unsur_egov.jpg

Wacana dan upaya membangun *e-Government* di Indonesia sudah berjalan sekitar 12 tahun. Sejumlah dana telah dibelanjakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membangunnya, melaksanakan kegiatan seminar, sosialisasi dan edukasi masyarakat pun telah diselenggarakan guna meyakinkan para pembuat kebijakan agar bersedia mendanai pembangunan *e-Government* ini.

Pelaksanaan *e-Government* oleh pemerintah tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penerapan *e-Government* menurut Anwar (2008: 126) adalah:

1. Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke

arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.

3. Menunjang *good governance* dan keterbukaan.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah

Secara singkat tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan *e-Government* adalah untuk menciptakan *customer online* dan bukan *in-line* (www.defkominfo.go.id). Aplikasi *e-Government* bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap desa memiliki profil Desa yang menggambarkan karakter desa secara menyeluruh yang meliputi data dasar penduduk, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Selain itu, setiap desa memiliki potensi desa yang menjelaskan keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi desa di atas inilah yang dapat dimasukkan kedalam model kebijakan e-desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Model Kebijakan *e-Desa* menggunakan teknologi *cloud computing*. *Cloud computing* terdiri dari dua kata yaitu "*cloud*" yang berarti awan dan "*computing*" yang berarti komputasi. Kunci dari *cloud computing* sebenarnya terletak pada kata "*cloud*" atau "awan", ini dapat dikatakan juga sebagai internet yang merupakan suatu lingkungan yang cukup besar yang didalamnya terdapat komputer yang saling berhubungan. Komputer tersebut dapat berupa *PC Personal* atau suatu jaringan komputer.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti merupakan perencana, penafsir data/informasi, dan pada akhirnya sekaligus menjadi pelapor hasil penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Dalam hal ini peneliti menentukan anggota informan berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Informan pada penelitian ini adalah kepala desa dan perangkatnya, aparatur BPPMD, Bapapsi Kabupaten Bandung dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Studi Pustaka dengan mengumpulkan data berupa bahan-bahan dalam pelbagai tulisan, buku, dokumen atau penjaringan data hasil penelitian yang relevan.
2) Studi Lapangan dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui pembangunan model kebijakan *e-Desa* di Kabupaten Bandung yang menjadi objek penelitian ini. Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).
3) Dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal atau konsep berupa catatan buku, majalah dan sebagainya yang terkait dengan pengembangan model kebijakan *e-Desa* dalam pembangunan desa di Kabupaten Bandung.

Analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan melalui tahapan umum prosedur pengolahan data kualitatif, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisia dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

(Sugiyono,2007:92-99)

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan mengecek kebenaran data mengenai pengembangan model kebijakan *e-Desa* dalam pembangunan desa di Kabupaten Bandung dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian di lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembangunan *e-Desa* dimaksudkan untuk memudahkan pengolahan administratif kependudukan di desa. Tujuan utama pengolahan administrasi kependudukan di desa seperti yang dipaparkan di dalam Perda Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan adalah untuk mengelola data penduduk secara lebih akurat dimulai tingkat desa dan kelurahan, lalu ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. desa di Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan Sistem Informasi melalui *e-Desa* diwujudkan melalui adanya komponen yang berupa aplikasi informasi khususnya dalam administrasi kependudukan. Salah satu desa yang menjadi *pilot project* dalam penelitian ini adalah Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pelayanan kependudukan. Kejelasan isi program *e-Desa* di Desa Cibeureum telah dipahami oleh pemerintah desa sehingga dapat memberikan instruksi kepada tenaga ahli/ *engineer* untuk membangun situs desanya yang berisi informasi dan arsip-arsip desa. Pengelola desa membutuhkan berbagai infrastruktur (*server*, *storage*, *software*, *wireless*, *hosting*) untuk mendukung, mengakses dan mengelola situs informasi desanya.

Secara teoritis *e-Desa* dapat dikatakan masuk kedalam kajian *e-Government* yang sedang *trend* saat ini di lingkungan pemerintahan. Model *e-Desa* diharapkan dapat membantu mengembangkan teori *e-Government* yang dimaksud. Pengembangan *e-Desa* dapat juga melahirkan desa-desa teknologi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Ketersediaan finansial khusus untuk *e-Desa* sendiri masih belum ada di Desa Cibeureum saat ini. Namun untuk pembangunan *web* desa sendiri sudah disiapkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebesar 5 juta rupiah pada setiap anggaran. Hal tersebut telah diatur sesuai dengan nomenklatur yang berlaku di Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung belum dapat mengakomodir pelaksanaan program *e-Desa* ini. Menurut hasil wawancara diketahui bahwa tidak pernah ada bantuan apapun dari Bapapsi ataupun dinas-dinas terkait lainnya. BPPMD dalam hal ini yang lebih aktif dalam memberikan dukungan kepada pemerintah desa terkait *e-Desa*.

Hasil wawancara dan observasi di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa kesulitan teknis dari Desa Cibeureum dalam pengembangan kebijakan model e-desa adalah:

1. Keterbatasan fasilitas komputer dan penunjangnya

Kantor Desa Cibeureum hanya memiliki 3 perangkat komputer dan 1 buah *printer* untuk menunjang pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada publiknya. Dari 3 perangkat komputer tersebut hanya 1 yang masih dalam kondisi maksimal untuk digunakan.

2. Belum masuk jaringan telepon

Desa Cibeureum belum tersentuh jaringan telepon, sudah beberapa kali pihak desa mengajukan permohonan jaringan, namun sampai saat ini belum terealisasikan. Selama ini untuk kegiatan yang memerlukan koneksi internet, pihak desa menggunakan modem yang disisihkan dari anggaran desa.

3. Kondisi geografis dari Desa Cibeureum

Dengan kondisi geografis Desa Cibeureum yang berada di pegunungan mengakibatkan masalah dalam jaringan. Beberapa provider mengalami gangguan jaringan atau bahkan tidak bisa digunakan di Desa Cibeureum.

4. Kebergantungan masyarakat desa pada staf desa yang tinggi

Masyarakat Desa Cibeureum sangat tergantung pada kantor desa, mereka menyerahkan segala sesuatunya pada desa. Peranan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tidak terlihat. Apapun kepentingan mereka misalnya membuat surat-surat, semua langsung mendatangi kantor desa. Kebergantungan masyarakat kepada kantor desa tidak terlepas dari kompetensi RT dan RW yang mereka nilai

Commented [cr1]: Tidak ada dalam daftar pustaka, lengkapi...!

kurang. Kondisi ini akan segera berubah karena Kepala Desa Cibeureum sedang melakuan Reformasi Struktur Desa. Staf-staf desa yang tidak kompeten diganti dengan standarisasi yang jelas, seperti minimal lulusan SMA, lebih diutamakan bahkan lulusan S1 dengan kemampuan mengoperasikan komputer. Belum ada kader khusus yang akan membina masyarakat untuk melek teknologi.

5. Tidak ada dukungan *leading sector*

Kepala Desa Cibeureum mengungkapkan bahwa selama kepemimpinannya dari tahun 2011, tidak ada dukungan dari dinas yang terkait dengan pengembangan *e-Desa* baik tingkat kabupaten maupun pusat. Bahkan janji pemerintah yang menjanjikan fasilitas internet gratis bagi masyarakat Desa Cibeureum karena ditunjuk menjadi Desa Teknologi pada tahun 2013 sampai saat ini belum terealisasikan dan tidak jelas.

Kemajemukan masyarakat Desa Cibeureum terlihat dari tingkat pendidikan yang beragam. Keberhasilan penerapan *e-Desa* di desa Cibeureum ditentukan oleh pemahaman masyarakat desa tentang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Desa Cibeureum merupakan *icon* dari desa-desa di Kecamatan Kertasari. Sasaran dari penerapan kebijakan e-desa adalah seluruh masyakakat terutama untuk pelayanan administrasi dan informasi, khususnya buruh tani dan wirausaha dalam pencarian informasi dan pengembangan potensi Desa Cibeureum. Dalam pengembangan kebijakan model e-Desa di Desa Cibeureum tentu saja perlaku yang diharapkan adalah perilaku yang positif, dalam Ilmu Komunikasi dikenal dengan istilah Efek Prososial Behavioral. Artinya bahwa masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan keterampilan dalam menggunakan fasilitas online *e-Desa*. Namun, sebelum pada tahapan perilaku memang diawali oleh adanya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang fasilitas *online e-Desa*.

Perkembangan dan hasil pembangunan di Kabupaten Bandung secara umum dapat dilihat dari beberapa indikator makro, yaitu indikator makro ekonomi dan indikator makro sosial budaya, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Kabupaten Bandung, media dan fasilitas komunikasi, seperti televisi, radio, telepon (atau *handphone*), surat kabar, buku, majalah dan sebagainya, hampir menjangkau ibukota desa-desa**.** Menurut CRI (2002), di Kabupaten dan Kota Bandung terdapat sekitar 17 radio komunitas dan sekitar 34 radio komersial (PRSSNI Jawa Barat, 2004). Secara umum, masyarakat Kabupaten Bandung juga dapat mengakses sekitar 12 siaran televise nasional, 4 siaran televisi lokal, 7 surat kabar nasional dan 5 surat kabar lokal.

Kebijakan publik diartikan sebagai keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan publik sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Prosedur pelayanan administrasi penduduk yang dilakukan oleh aparatur desa mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Prosedur Permohonan Surat Kartu Keluarga
b. Prosedur Permohonan Surat Kartu Penduduk
c. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Serbaguna
d. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Kematian
e. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Kelahiran
f. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
g. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Pindah
h. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Nikah
i. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Kelakuan Baik

E-Desa merupakan layanan berbasis *web* guna menfasilitasi desa dalam mengelola data dan menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat, maupun pihak-pihak lain. Dengan menggunakan sistem *E-Desa*, diharapkan pengelolaan data-data desa yang bersifat konvensional, lebih dapat berjalan efisien, mudah dan lebih aman. Informasi yang disampaikan pun dapat diakses oleh semua orang, baik masyarakat maupun pengampu kepentingan lainnya. *E-Desa* berbasis *web* dapat digunakan sebagai media promosi bagi desa untuk dapat menampilkan potensi dan dan keunggulannya secara luas. Disamping itu, kegiatan-kegiatan pengolahan data

desa dapat dilakukan lebih teroganisir, lebih teratur dan lebih aman. Sistem *e-Desa* dilengkapi dengan fitur-fitur pelayanan administrasi kependudukan masyarakat desa seperti pengurusan permohonan SKK (Surat Kartu Keluarga), SKTP (Surat Kartu Tanda Penduduk), SKP (Surat Keterangan Pindah), SKKL (Surat Keterangan Kelahiran), SKKM (Surat Keterangan Kematian), SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik), SKSG (Surat Keterangan Serbaguna), SKU (Surat Keterangan Usaha), SKNA (Surat Keterangan Nikah), dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), sehingga dapat mempermudah masyarakat desa dalam pengurusan dokumen-dokumen tersebut.

Sistem e-*Desa* memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang disampaikan oleh desa secara lebih luas, disamping itu dengan berbasis web maka informasi-informasi tersebut dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lainnya untuk mendapat informasi mengenai desa tersebut. Dari sisi aparatur desa, sistem *e-Desa* diharapkan akan mempermudah dalam pengelolaan data-data desa dan pelayanan administrasi penduduk desa.

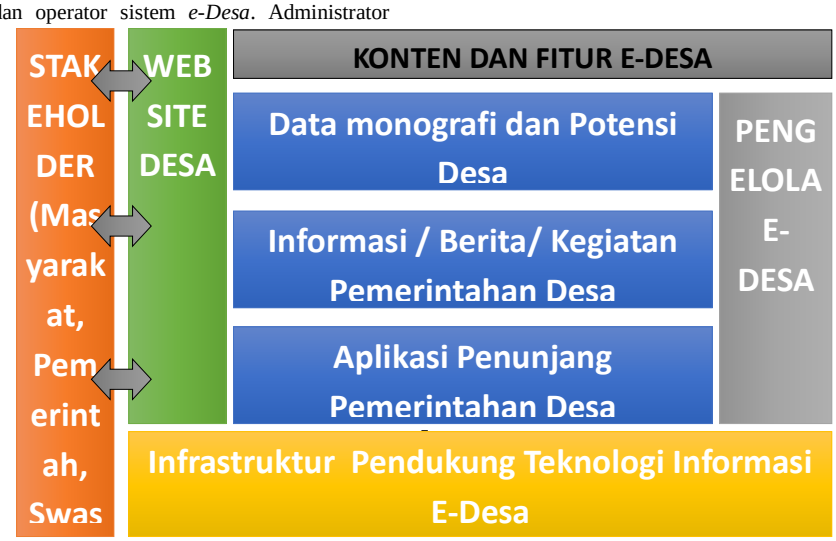
Gambar 2. Sistem *e-Desa*



Komponen Sistem *e-Desa* :

1) Pengelola *e-Desa* adalah aparatur desa yang diberikan tugas untuk menjadi administrator dan operator sistem *e-Desa*. Administrator adalah *user* yang memiliki hak akses untuk mengkonfigurasi sistem *E-Desa*, sedang operator bertugas memasukkan data-data pada sistem *E-Desa*.
2) Penduduk, masyarakat umum, pemerintah, swasta dapat mengakses informasi-informasi yang disajikan oleh desa melalui sistem *e-Desa*.
3) Penduduk desa dapat melakukan pengurusan dokumen-dokumen kebutuhannya secara *online*, atau melalui kantor desa untuk memepercepat cpelayanan desa, serta pelayanan administrasi penduduk desa secara *online*.
4) Infrastuktur pendukung teknologi Informasi *e-Desa*, perangkat-perangkat pendukung seperti komputer, modem, jaringan komputer dan koneksi internet guna mendukung keberlangsungan berjalannya sistem *e-Desa*.

Gambar 3. Konten dan Fitur *e-Desa*



Stakeholder dari pemerintah desa yaitu perangkat desa, sangatlah menentukan keberhasilan pengembangan model *e-Desa* ini. Namun disayangkan ketika pemerintah mulai Pusat dan Daerah sedang giat-giat mendengungkan *e-Government*, justru pemerintah desa dibiarkan tetap beroperasi secara konvensional. Belum semua desa memiliki komputer yang memadai, apalagi tersambung internet. Padahal pelaporan sekarang sudah berbasis IT. Terlebih lagi dengan kemampuan IT para perangkat desanya yang masih sangat kurang, termasuk di Kabupaten Bandung.

Kelak, desa harus kuat untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan upaya penguatan kelembagaan di desa. Kelembagaan desa nantinya akan mendapatkan dana desa yang cukup besar. Untuk mengelola dana desa yang cukup besar tersebut, dibutuhkan SDM dan pengetahuan, sehingga pengelolaannya nanti sesuai seperti yang diharapkan.

Perangkat desa yang harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup agar bisa mengelola pemerintahan desanya. Salah satu syarat bagi perangkat desa adalah harus bisa mengoperasikan komputer dan internet. Hal ini dikarenakan masyarakat informasi tidak lepas dari tiga komponen utama yang menjadi pendorongnya yaitu dinamika informasi dan komunikasi, perkembangan dalam teknologi informasi (komputer), dan perkembangan dalam teknologi komunikasi.

Idealnya ada seorang perangkat desa yang memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dan internet di kantor desa. Sehingga program pemerintah yang memanfaatkan IT ini dapat berjalan dengan optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi wilayah Kabupaten Bandung mendorong pengembangan model kebijakan *e-Desa* harus segera direalisasikan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tingkat kesulitan teknis pelaksanaan pembangunan *e-Desa* di Kabupaten Bandung meliputi keterbatasan fasilitas komputer dan penunjangnya, jaringan telepon**,** ketergantungan masyarakat desa pada staf desa yang tinggi**,** belum ada kader khusus yang akan membina masyarakat untuk melek teknologi dan belum ada dukungan *leading sector*.
3. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran dari kebijakan *e-Desa* di Kabupaten Bandung sistem kehidupan masyarakat yang pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan dimana sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian khususnya sebagai buruh tani. Masyarakat desa tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, dan adat istiadat.
4. Proporsi kelompok sasaran dari pelaksanaan *e-Desa* di Kabupaten Bandung dapat mempermudah dalam menyebarkan informasi mengenai desa berbasis *web* dan bersifat *online*. Proses administrasi desa dapat menjadi otomatis, sehingga dapat memberikan pelayanan yang akurat, cepat, mudah dan murah kepada masyarakat. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dari adanya kebijakan model *e-Desa* di Kabupaten Bandung adalah perilaku yang positif dimana masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan keterampilan dalam menggunakan fasilitas *online e-Desa*.
5. Variabel lingkungan dalam pengembangan *e-Desa* di Kabupaten Bandung dapat dilihat dari beberapa indikator makro, yaitu indikator makro ekonomi dan indikator makro sosial budaya, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Bandung merupakan salah satu contoh daerah pinggiran kota dari Kota Bandung (Ibukota Provinsi Jawa Barat), infrastruktur dan sumber-sumber produktif jauh lebih lengkap dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan daerah-daerah lainnya. Di Kabupaten Bandung, media dan fasilitas komunikasi, seperti televisi, radio, telepon (atau *handphone*), surat kabar, buku, majalah dan sebagainya, hampir menjangkau ibukota desa-desa. Disamping itu, di Kabupaten Bandung juga terdapat kelompok sosial dan lembaga ekonomi pedesaan, seperti: pesantren, koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat, lumbung desa, toko sarana produksi pertanian dan kelembagaan non formal lainnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Rancanglah *web desa* untuk mempromosikan potensi desa yang ada di Kabupaten Bandung.
2. Tingkatkan perangkat lunak (*Software*), kebutuhan perangkat keras (*Hardware*) dan kebutuhan perangkat pikir (*Brainware*) sesuai kebutuhan pengembangan *e-Desa* di Kabupaten Bandung.
3. Bentuklah koordinator/kaderisasi untuk pendidikan dan pelatihan TIK kepada masyarakat desa di Kabupaten Bandung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membiayai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. Khoirul dan Asianti Oetojo S. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah SIMDA.* Yogayakarta: Pustaka Pelajar.

Holmes, Douglas. 2001. *E-Gov, E-Business Strategies fot Government*. London:Nicholas Brealey Publishing.

Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. London:SAGE Publications, Ltd.

Mazmanian, Daniel. A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. United State Of America:Scott, Foresman and Company.

Meter, Donald S. Van and Carl E. Vanhorn. 1975. *The Policy Implementation Prosess:A Conceptul Framework.* Ohio State University:Sage Publications Inc.

Miller, Michael. 2008. *Cloud Computing Web-based Application That Change The Way You Work and Collaborative Online. Indianapolis:quepublishing.*

Perda Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan.

Siagian, H. 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Desa, Masyrakat Desa.* Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Soedjadi, FX. 1989. *Organisasi dan Metode, Penunjang Berhasilnya Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.

Wahana Komputer. 2011. Kupas Tuntas Bermacam Aplikasi Generasi Cloud Computing. Yogyakarta:Andi.